

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam mempertahankan usaha bisnis di era globalisasi diperlukan adanya suatu tindakan yang dapat menunjang tujuan perusahaan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan adanya perencanaan yang disertai dengan pengendalian yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan internal auditor untuk mengawasi pengendalian di dalam perusahaan. Internal auditor juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam perusahaan yang dapat membahayakan harta perusahaan. Tidak hanya peran auditor yang dibutuhkan tetapi perusahaan juga perlu menerapkan *good corporate governance* (GCG).

GCG juga bermanfaat bagi perusahaan dalam melindungi hak para pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan dalam menarik para investor. *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sutedi, 2011). Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, disebutkan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Oleh karena itu penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan yang telah *go public* di Indonesia sangat penting untuk menunjang akuntabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Di Indonesia terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal karena pengelolaan yang masih terjebak dalam pola kerja yang birokrasi daripada sebagai perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan belum maksimal, serta adanya praktek *mismanagement* yang mengarah pada efisiensi dan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan BUMD.

Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance* (Tunggal, 2008, 1). Dalam mencapai tujuan perusahaan akan

terhambat dengan adanya risiko, maka peran audit internal dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan risiko sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Organisasi profesi internal auditor berkeyakinan bahwa fungsi internal audit yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. Dalam struktur *corporate governance*, auditor internal merupakan salah satu dari organ utama direksi perusahaan. Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan mendasar *checks and balances* untuk terlaksananya tata kelola yang baik (*good governance*). Saat ini fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengendalian risiko serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab top manajemen (Trimanto dan Lena, 2010).

Terdapatnya isu yang penulis temui terkait dengan perusahaan daerah air minum yaitu berhubungan dengan tagihan rekening air yang meningkat. Warga desa mengeluh lantaran tagihan rekening air meningkat, kenaikan yang dirasakan warga tidak sesuai dengan penggunaan air sehingga membuat warga keberatan dan bahkan tidak sanggup untuk membayar. Beberapa kemungkinan terjadinya kenaikan tagihan rekening air diantaranya yaitu pertama diakibatkan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh petugas pembaca meter, kedua akibat adanya kebocoran pada pipa instalasi setelah meter, dan ketiga akibat alat pengukur meter yang rusak. Berdasarkan isu tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan

judul : “Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi pembahasan masalah yaitu :

1. Apakah audit internal yang ada pada PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung telah memadai ?
2. Bagaimana peran audit internal yang ada di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dalam menunjang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bahwa audit internal yang ada di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung telah memadai
2. Mengetahui peran audit internal yang ada di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dalam menunjang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. **Bagi penulis**, untuk memenuhi salah satu persyaratan menepuh sidang sarjana strata 1 (S1) bagi setiap mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Kristen Maranatha serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan *Good Corporate Governance*.
2. **Bagi peneliti selanjutnya**, menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian di masa yang akan datang dan menjadi perbandingan bagi tulisan sejenis yang membahas hal serupa.
3. **Bagi perusahaan**, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan peran audit internal untuk mencapai tata kelola yang lebih baik.